

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah yang juga melibatkan peran swasta dan masyarakat. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan pemangku kepentingan di daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Walaupun peraturan perundang-undangan secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan koridor aturan perundang-undangan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintahan pusat, dokumen perencanaan pemerintah dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dokumen perencanaan Provinsi yang juga terdiri dari RPJPD, RPJMD serta RKPD Provinsi, sehingga diharapkan pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan Provinsi serta Nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.

Landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan terbitnya Undang-undang Pemerintahan di atas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang turut memberi warna bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang selanjutnya mewajibkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dan Rencana Kerja Setiap Tahun yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi yang disusun secara berurutan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis OPD hingga kepada Rencana Kerja OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 mengatur lebih detil tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan pemerintahan. Aturan tentang isi dan tata cara prosedur penyusunan mulai dari RPJP yang berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun, RPJM dengan durasi waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Tahunan Pemerintah yang diharapkan akan menunjukkan satu garis

tegas keterkaitan dari setiap dokumen perencanaan agar terjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai salah satu OPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan, mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang investasi dan perizinan dengan metode pelayanan terpadu satu pintu. Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan kegiatan pelayanan perizinan dan investasi. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat penting guna memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan dalam upaya mencapai terwujudnya Good Governance khususnya di bidang pelayanan perizinan dan investasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Perwako Batam Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
17. Perwako Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah untuk menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam selama periode 2016-2021 serta sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan perencanaan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
4. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Investasi.
5. Memberikan acuan dalam Investasi di Kota Batam agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.

6. Mewujudkan produktivitas ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Terwujudnya produktifitas berusaha dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), 2.2 Sumber Daya OPD,

- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD,
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi OPD,

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD,

4.3 Strategi dan Kebijakan

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis dan Lembaga Lain, tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam diatas;

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah :

Merumuskan, Membina, Mengendalikan, Mengkoordinasikan dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mempunyai

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi, Data dan Informasi, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Data dan Informasi, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Data dan Informasi, Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, Bidang Perizinan Ekonomi Sosial, Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari :

1. Sekretariat / Sekretaris.
2. Bidang Promosi, Data dan Informasi.
3. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan.
4. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial.
5. Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ad.1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Fungsi Sekretaris:

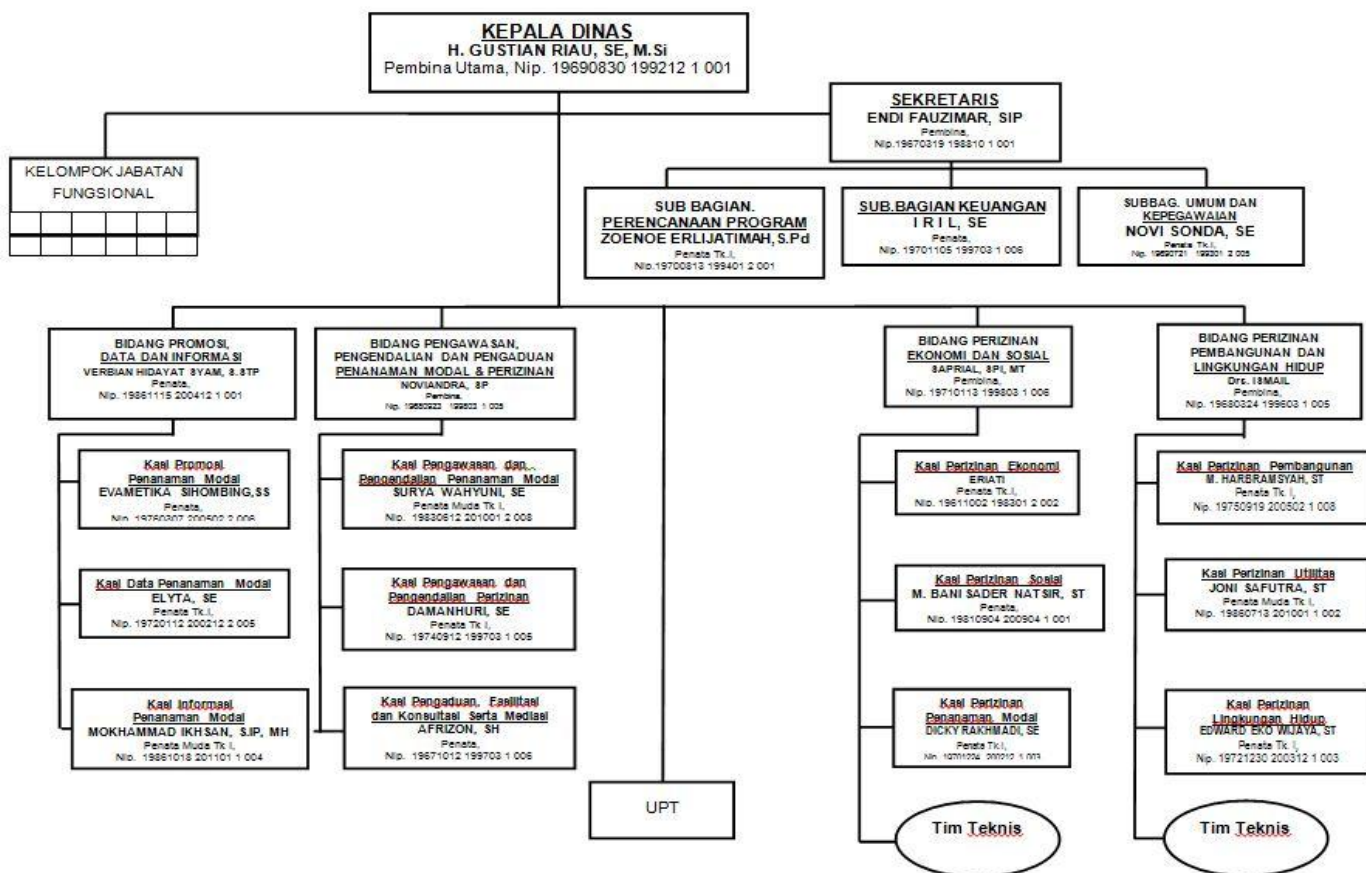
- 1). pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
- 2). pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- 3). pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan asset;
- 4). pelaksanaan penginventarisasi, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5). Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 6). Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

GAMBAR 2.1



STRUKTUR ORGANISASI DPM-PTSP KOTA BATAM

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**



No.	Penempatan	Menurut Pendidikan				Jumlah
		SMU	D3	S1	S2	
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	6	5	7	1	19
3.	Bidang Promosi, Data dan Informasi	1	1	6	2	10
4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan perizinan	2	1	9	-	12
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	6	-	5	1	12
6.	Bidang Perizinan	10	1	11	1	23

	Pembangunan dan Lingkungan Hidup					
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>77</b>

**Tabel.2.2**  
Kondisi Pegawai DPM-PTSP Kota Batam menurut Golongan

No.	PENEMPATAN	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	5	6	1	12
3.	Bidang Promosi, Data dan Informasi	-	-	6	1	7
4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan perizinan	-	3	5	1	9
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	-	6	1	7
6.	Bidang Perizinan dan Pembangunan dan Lingkungan Hidup		3	9	1	13
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>49</b>

**Tabel 2.3**  
Kondisi Pegawai DPM-PTSP Kota Batam menurut Eselon dan Staf

No.	PENEMPATAN	ESELON DAN STAF	Jumlah
-----	------------	-----------------	--------

		II	III	IV	STAF	
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	13	17
3.	Bidang Promosi, Data dan Informasi	-	1	3	6	9
4.	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan perizinan	-	1	3	8	12
5.	Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi	-	1	3	12	15
6.	Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-	1	3	16	20
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>77</b>

## 2.2.2. Sarana dan Prasarana

**Tabel 2.4**

Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

DATA ASET DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2011-2016						
NO	JENIS ASET	NILAI ASET	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ASET BERGERAK</b>						
1	Station Wagon	121,600,000	2000	RR	Sekretariat	Toyota / Kijang
2	Station Wagon	121,600,000	2005	B	Kepala Badan	Toyota Inova
3	Station Wagon	121,600,000	2006	B	Kabid. Promosi dan Kerjasama	Toyota Avanza
4	Sedan	75,000,000	2008	RR	Kasubid. Pengawasan	Toyota Corolla
5	Station Wagon	143,728,500	2012	B	Kasubid. Perizinan Sosial	Toyota Avanza
6	Hilux	150,000,000	2014	B	Kabid. Pengawasan dan Pengaduan	Toyota HILUX 2.0L M/T
<b>II. ASET TIDAK BERGERAK</b>						
1	Facsimile	1,890,000	2011	B	Pengurus Barang	
2	Ac Split Panasonic	24,300,000	2012	B	Pengurus Barang	
3	Ac Split Panasonic	24,300,000	2012	B	Pengurus Barang	

4	Dispenser (Sharp)	1,900,000	2012	B	Pengurus Barang	
5	Komputer Compaq Presario CQ 3622D	8,750,000	2012	B	Pengurus Barang	
6	Laptop Sony Vaio VPCSB36 FG	11,750,000	2012	B	Pengurus Barang	
7	Kamera Nikon SLR D5100 Kit VR	9,970,000	2012	B	Pengurus Barang	
8	Lemari Kayu	4,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
9	Lemari Kayu	4,150,000	2013	B	Pengurus Barang	
10	Lemari Kayu	4,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
11	Meja Rapat	12,800,000	2013	B	Pengurus Barang	
12	Meja Rapat	12,900,000	2013	B	Pengurus Barang	
13	Kursi Tamu	6,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
14	Kursi Tamu	6,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
15	Kursi Tunggu Tamu	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
16	Kursi Tunggu Tamu	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
17	Kursi Tunggu Tamu	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
18	Kursi Tunggu Tamu	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
19	Ac	3,800,000	2013	B	Pengurus Barang	
20	Ac	3,800,000	2013	B	Pengurus Barang	
21	Ac	3,800,000	2013	B	Pengurus Barang	
22	Ac	3,800,000	2013	B	Pengurus Barang	
23	Ac Split	24,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
24	Dispenser	1,800,000	2013	B	Pengurus Barang	
25	Dispenser	1,800,000	2013	B	Pengurus Barang	
26	Dispenser	2,280,000	2013	B	Pengurus Barang	
27	TV LED SHARP	4,200,000	2013	B	Pengurus Barang	
28	TV LED SHARP	4,200,000	2013	B	Pengurus Barang	
29	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
30	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
31	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
32	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
33	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
34	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
35	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
36	Komputer	7,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
37	Laptop Sony Vaio	14,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
38	PRINTER HP LJ P1102	1,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
39	PRINTER HP LJ P1102	1,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
40	PRINTER HP LJ P1102	1,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
41	Printer HP LI1102	1,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
42	Printer EPSON INK T13X	1,350,000	2013	B	Pengurus Barang	
43	Printer HP LI1102	1,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
44	Printer EPSON INK T13X	1,350,000	2013	B	Pengurus Barang	
45	Printer HP LI1102	1,500,000	2013	B	Pengurus Barang	
46	Printer EPSON INK T13X	1,350,000	2013	B	Pengurus Barang	

47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
49	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
50	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
51	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
52	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3,750,000	2013	B	Pengurus Barang	
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3,950,000	2013	B	Pengurus Barang	
63	Meja Tamu	3,000,000	2013	B	Pengurus Barang	
64	Meja Tamu	3,000,000	2013	B	Pengurus Barang	
65	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
69	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
70	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
71	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
72	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	

73	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
74	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,700,000	2013	B	Pengurus Barang	
75	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
76	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
77	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
78	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
79	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
80	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
81	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
82	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
83	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
84	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1,300,000	2013	B	Pengurus Barang	
85	Kamera CCTV	24,750,000	2013	B	Pengurus Barang	
86	Kamera CCTV	23,200,000	2013	B	Pengurus Barang	
87	Printer Laserjet	1,500,000	2014	B	Pengurus Barang	
88	Printer Laserjet	1,500,000	2014	B	Pengurus Barang	
89	Printer Laserjet	1,500,000	2014	B	Pengurus Barang	
90	Proyektor	6,800,000	2014	B	Pengurus Barang	
91	Komputer	7,400,000	2014	B	Pengurus Barang	
92	Komputer	7,400,000	2014	B	Pengurus Barang	
93	Komputer	7,400,000	2014	B	Pengurus Barang	
94	Komputer	7,400,000	2014	B	Pengurus Barang	
95	Komputer	7,400,000	2014	B	Pengurus Barang	
96	AC Split	7,500,000	2014	B	Pengurus Barang	
97	AC Split	7,500,000	2014	B	Pengurus Barang	
98	Running Text	22,250,000	2014	B	Pengurus Barang	
99	Scanner	2,600,000	2014	B	Pengurus Barang	
100	Screen Projector Motorized 70"	4,900,000	2014	B	Pengurus Barang	
101	Kursi Kerja Eselon II	4,400,000	2014	B	Pengurus Barang	
102	Meja Kerja	11,800,000	2014	B	Pengurus Barang	
103	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
104	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
105	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
106	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
107	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	

108	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
109	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
110	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
111	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
112	Meja Kerja 1/2 Biro	2,200,000	2014	B	Pengurus Barang	
113	Meja Kerja 1 1/2 Biro	4,800,000	2014	B	Pengurus Barang	
114	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
115	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
116	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
117	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
118	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
119	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
120	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
121	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
122	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
123	Kursi Kerja	900,000	2014	B	Pengurus Barang	
124	Komputer / PC	11,850,000	2015	B	Pengurus Barang	
125	Komputer / PC	11,850,000	2015	B	Pengurus Barang	
126	Komputer / PC	11,850,000	2015	B	Pengurus Barang	
127	Komputer / PC	11,850,000	2015	B	Pengurus Barang	
128	Touchscreen	29,000,000	2015	B	Pengurus Barang	
129	Printer	9,300,000	2015	B	Pengurus Barang	
130	Printer	9,300,000	2015	B	Pengurus Barang	
131	Printer	9,300,000	2015	B	Pengurus Barang	
132	Door Access	6,000,000	2015	B	Pengurus Barang	
133	Lemari Arsip	41,500,000	2015	B	Pengurus Barang	
134	GPS Garmin	5,000,000	2015	B	Pengurus Barang	
135	GPS Garmin	5,000,000	2015	B	Pengurus Barang	
136	Server	34,500,000	2015	B	Pengurus Barang	
137	Rak Server	9,424,275	2015	B	Pengurus Barang	
<b>III. ASET LAINNYA</b>						
	-	-	-	-	-	-

### 2.3. Kinerja Pelayanan DPM-PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Kota Batam, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Batam nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tanggal 9 Desember 2016, serta Peraturan Walikota Batam tentang Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kota Batam.

Kondisi Perkembangan pelaksanaan Tupoksi DPM-PTSP selama lima tahun terakhir ( 2011-2015) dapat dilihat sebagai berikut :

### 2.3.1 Perkembangan Kinerja Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

Tabel 2.5

#### Gambaran Kinerja Bidang Promosi dan Kerjasama

NO	PERKEMBANGAN DAN REKAPITULASI PROMOSI MELALUI BPM & PTSP			
	TAHUN 2011 S/D 2015			
	TAHUN	NAMA PAMERAN	TEMPAT	HASIL
1	2011	HARKOPNAS	Jakarta	Pameran dalam rangka HARKOPNAS, yang diikuti kab/kota se-Indonesia
		Batam Expo	Batam	Mendukung Kota Batam sebagai Kota Mice (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) sebagai implementasi event tetap tahunan sejak 2001
		Trade Tourism and Investment Expo	Xianmen, China	Mengikuti promosi bersama dengan Provinsi Kepri di China
2	2012	TITEX EXPO	Bali	Pameran Investasi, Pariwisata dan Perdagangan di Bali
		Batam Expo	Batam	Mendukung Kota Batam sebagai Kota Mice (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) sebagai implementasi event tetap tahunan sejak 2001
3	2013	Batam Expo	Gedung SPC Batam	Mendukung Kota Batam sebagai Kota Mice (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) sebagai implementasi event tetap tahunan sejak 2001
		Invesda Expo	Gedung Invesda Expo Center Jogjakarta	Memperkenalkan potensi dan peluang investasi Batam sebagai daerah FTZ. Peserta dari berbagai produk dari provinsi kab/kota di Indonesia
		Market Sounding (Promosi terpadu tentang pengelolaan sampah di Kota Batam)	New York, USA	Pembelajaran terhadap Kota New York yang telah menyatukan porsi retribusi/tarif sampah ke pajak daerah sehingga dapat dipungut bersamaan dengan pemungutan pajak sebagai upaya meminimalkan potential loss retribusi sampah/kebersihan di Kota New York
4	2014	Batam Expo dialihkan MTQN Expo 2014	Alun-alun Engku Putri Batam	Mendukung Kota Batam sebagai tuan rumah pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke XXV Tahun 2014
		Bittra Expo (Bandung Trade Tourism and Investmen Expo)	Graha Siliwangi-Bandung	Peserta dari berbagai kalangan dengan berbagai produk dari prvinsi/kab/kota di Indonesia
5	2015	Pekan Raya Sumatera Utara ( Medan )	Komp. Tاپian Daya Jl. Gatot Subroto	Ajang Promosi Budaya, Seni dan Hiburan
			238 Medan - Sumut	Ajang promosi produk unggulan se kab/kota & prov.Sumut
				Ajang Transaksi dagang para UMKM



	Invesda Expo 2015 - Jogjakarta	Halaman Depan Jogja Expo Centre	Ajang promosi investasi daerah
			Ajang sarana temu bisnis antara Pemda dan para pelaku usaha
			Ajang menciptakan jaringan kerja, kerjasama investasi kab/kota dengan
			dunia usaha lokal dan asing.
	Jakarta Inacraft 2015	Assembly Hall Jakarta	Ajang promosi potensi daerah
		Convention Centre	Ajang sarana temu bisnis antara Pemda dan para pelaku usaha
			Upaya mendapatkan pasar baru bagi produk unggulan Indonesia keluar
			negeri
	Bali Inafact 2015	Lippo Mall - Bali	Ajang Promosi Budaya, Seni dan Hiburan
			Ajang promosi produk unggulan se Indonesia
			Ajang Transaksi dagang para UMKM
	Java Expo 2015	Gedung Benteng Vastenburg - Solo	Ajang promosi investasi daerah
			Ajang sarana temu bisnis antara Pemda dan para pelaku usaha
			Ajang menciptakan jaringan kerja, kerjasama investasi kab/kota dengan
			dunia usaha lokal dan asing.
	Bandung inafest 2015	LANUD Husin Sastranegara - bandung	Ajang promosi potensi daerah
			Ajang sarana temu bisnis antara Pemda dan para pelaku usaha
			Upaya mendapatkan pasar baru bagi produk unggulan Indonesia keluar negeri

Kegiatan Promosi merupakan kegiatan Marketing Potensi Daerah yang hasilnya tidak serta merta secara langsung. Namun kegiatan Promosi Potensi Daerah perlu terus dilakukan dalam upaya menciptakan **Positive Image** suatu daerah kepada investor dalam dan luar negeri serta sebagai upaya menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kota Batam.

Berbagai strategi promosi terus dilakukan antara lain melalui **promosi langsung**, road show Investasi, Businnes Forum serta **Penyebaran informasi** potensi Daerah melalui berbagai media, booklet, leaflet, brochure serta bentuk media lainnya.

Teknis pelaksanaan tugas promosi dalam dan luar negeri adalah melakukan **koordinasi** dengan berbagai instansi terkait antara lain BKPM.RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretariat Negara serta dengan pihak

Perwakilan RI di luar negeri antara lain melalui Kedutaan Besar RI dan Consulate Jenderal RI di negara tempat tujuan promosi, serta Networking dengan event organizer promosi didalam dan luar negeri.

Tabel 2.6

**PERKEMBANGAN DAN REKAPITULASI KERJASAMA MELALUI DPM & PTSP  
TAHUN 2011-2015**

NO	TAHUN	MITRA	HASIL
1	2011	Kabupaten Bogor	Nota Kesepakatan Bersama tentang Promosi dan Investasi
		Kota Denpasar	Penjajakan Kerjasama agar tercapainya Pemahaman, Komitmen dan Peluang-peluang kerjasama
2	2012	Kota Medan	Penjajakan Kerjasama dan Penyusunan Draft Nota Kesepahaman Batam
		Kota Bandung	Perpanjangan Nota Kesepakatan bersama, evaluasi terhadap hambatan dalam kerjasama serta pembentukan tim kerjasama untuk pembahasan kerjasama
	2013		
		Kabupaten Badung Prov. Bali	Penjajakan kerjasama dengan Pemkab Badung agar tercapainya pemahaman, Komitmen dan Informasi peluang-peluang kerjasama
		Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel	Penandatanganan MoU Pemko Banjarmasin dengan Pemko Batam
		Kota Surakarta	Melakukan evaluasi hubungan kerjasama antara Kota Surakarta dan Kota Batam, melakukan temu usaha antara pelaku usaha kedua belah pihak
4	2014	Kota Medan	Evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut penanda tanganan MoU yang telah ditandatangani tahun 2014
		Kabupaten Karang Anyar	Penandatanganan Mou
5	2015		
		Kab. Deli Serdang	Penjajakan Kerjasama dengan Pemkab.Deli Serdang- Sumut
		Kota Denpasar - Bali	Penjajakan Kerjasama dengan Pemkab.Deli Serdang - Bali
		Kab. Karang anyar	Tindak Lanjut Kerjasama dengan pemerintah Kab. Karang Anyar menjadi MoU

Tabel. 2.7

Kesepakatan Bersama (MoU) Luar Neger antara pemko Batam dengan negara lain

No	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PENANDA TANGANAN	JANGKA WAKTU	BERAKHIR	KETERANGAN
1.	Pemko Shenzhen-RRC	Shenzhen-RRC 18-Des-06	-	-	Letter Of Intent

2.	Pemko Gimje-Korsel	Gimje-Korsel 28-Des-11	-	-	Letter Of Intent
3.	Pemko Gimje-Korsel	Batam, 17-Agust-13	5 tahun	17-Agust-18	MoU/Memorandum Saling Pengertian

### 2.3.2 Perkembangan Pengawasan dan Pengaduan

Tabel.2.8

#### REKAPITULASI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PERIZINAN DPMPTSP TAHUN 2015

NO.	JENIS PENGAWASAN	JUMLAH
1	Pengawasan dan Pendataan LKPM PMA & PMDN	77
2	IMTA	1
3	MIKOL	2
4	IMB	34
5	HO, SIUP, TDP, TDUP	89
6	Jasa Usaha Pariwisata	36
7	Menara	1
	JUMLAH	240

Sebagaimana Tabel 2.7 diatas bahwa pengawasan yang tertinggi adalah point 5 (HO,SIUP,TDP dan TDUP) dan dilanjutkan dengan LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal).



Tabel.2.9

**REKAPITULASI PENGADUAN PERIZINAN DPMPTSP TAHUN 2015**

NO.	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	IMB	13
2	HO, SIUP, TDP, TDUP	2
3	Jasa Usaha Pariwisata	6
4	Menara	6
5	Drynase	1
6	Lahan Parkir	1
7	Billboard	1
8	Buffer Zone	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>

Fungsi-fungsi pengawasan sangat penting untuk dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dikota Batam. Fungsi pengawasan tersebut antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal baik PMA ( Penanaman Modal Asing ) maupun PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri ) , melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan industrial pada kegiatan investasi dan ikut serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada kegiatan investasi antara pengusaha, pekerja bersama-sama instansi terkait.

Untuk menunjang kelancaran dan penguatan fungsi-fungsi pengawasan tersebut, maka Walikota Batam telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.133/HK/III/2015 tentang Penunjukkan Tim Terpadu Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Kota Batam Tahun 2015, serta berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Hukum Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, antara lain:

1. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. PP No.46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.
4. PP No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
5. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Batam yang terkait dengan perizinan yang dikeluarkan di DPMPTSP Kota Batam.

Pengawasan Pengendalian yang dilakukan juga sebagai andil untuk ikut berperan dalam urusan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, sehingga terjadi peningkatan terhadap Perizinan yang diterbitkan. Dan akan berdampak kepada Retribusi yang dibayarkan.

Adapun Rincian PAD yang telah dicapai dari Retribusi Perizinan yang telah dilakukan DPMPTSP Kota Batam sebagaimana tabel berikut:

#### DATA PAD DARI RETRIBUSI PADA DPM PTSP KOTA BATAM

NO	JENIS PENERIMAAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>						
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Retribusi Perizinan pada SKPD terkait				16,396,034,275.72
2	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					960,000,000.00
3	Izin Gangguan (HO)					3,426,918,569.35
4	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)					34,913,095,350.00
<b>TOTAL</b>					<b>55,696,048,195.07</b>	

#### 2.3.3 Perkembangan Perizinan

Secara struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang yang menangani langsung Perizinan terdiri dari Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Bidang perizinan Sosial dan Ekonomi.

Tabel 3.0

Rekapitulasi Perkembangan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
Perizinan						
Jumlah Perizinan yang dilayani	Perizinan	12.941	12.996	14.211	12.563	13.191

--	--	--	--	--	--	--

Sebagaimana Tabel diatas bahwa perkembangan pencapaian Kinerja sesuai dengan data yang tersedia menunjukkan kecenderungan kinerja yang dicapai adalah meningkat dari tahun 2011 sampai 2013, pada tahun 2014 menurun dan naik lagi pada tahun 2015. Namun peningkatan tersebut masih belum optimal agar pertumbuhan Perizinan meningkat memerlukan langkah-langkah dan upaya antara lain mempermudah pelayanan perizinan.

Pada tahun anggaran 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batam mengadakan pembenahan-pembenahan antara lain:

1. Membangun system Perizinan yang berbasis teknologi,
2. Penyederhanaan alur perizinan,
3. Penataan ruang dan personil yang berada di 2(dua) kantor DPMPTSP.
4. Persiapan Pelayanan Perizinan online.

Sesuai Peraturan Wali Kota Batam no.38 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu satu pintu Kota Batam, jenis-jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan DPM-PTSP adalah berjumlah 52 jenis perizinan dan non perizinan, dengan rincian sebagai berikut:

### **1. PENANAMAN MODAL**

- 1.Izin Prinsip Penanaman Modal
- 2.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- 3.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
- 4.Izin Usaha
- 5.Izin Usaha Perluasan
- 6.Izin Usaha Perubahan
- 7.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- 8.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan

### **2. LINGKUNGAN HIDUP**

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Pembuangan Air Limbah
3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
4. Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kota
5. Izin Lingkungan
6. Persetujuan Kelayakan Dokumen Lingkungan(Amdal).

### **3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 1.. Izin Instalasi Kabel.
2. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator
3. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
4. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar

- Radio dan Televisi
5. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi
  6. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos

#### **4.PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)
5. Izin Usaha Industri (IUI)
6. Izin Perluasan.
7. Izin Usaha Kawasan Industri.
8. Izin Perluasan Kawasan Industri.
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

#### **5.PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### **6.TATA KOTA**

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)

#### **7.TENAGA KERJA**

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
2. Izin lembaga pelatihan kerja
3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

#### **8.KESEHATAN**

1. Surat Izin Praktek Bidan.
2. Izin Praktek Perawat.
3. Izin Kerja Perawat
4. Izin Pendirian Rumah Sakit
5. Izin Operasional Rumah Sakit.
6. Izin Klinik Pratama/Utama.
7. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan.
8. Izin Rumah Bersalin.



## 9.PERHUBUNGAN

- 1.Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor.
- 2.Izin Usaha Parkir Umum&Khusus.
- 3.Izin Usaha Angkutan Umum.

## 10.KELAUTAN,PERIKANAN,PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- 1.Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming.
- 2.Surat Izin Usaha Poultry Shop.

## 11.PASAR

- 1.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
- 2.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
- 3.Izin Usaha Toko Modern(IUTM)

Tabel 3.1

RINCIAN IZIN YANG TELAH DIKELUARKAN DPM PTSP KOTA BATAM

Tahun 2014 - 2015

NO	BIDANG/SEKTOR	Jumlah izin yang dikeluarkan			
		2014		2015	
		JENIS PERIZINAN	JUMLAH	JENIS PERIZINAN	JUMLAH
1	PENANAMAN MODAL	Izin Prinsip Penanaman Modal	48	Izin Prinsip Penanaman Modal	30
		Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0
		Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0
		Izin Usaha	25	Izin Usaha	14
		Usaha Perluasan	3	Izin Usaha Perluasan	0
		Izin Usaha Perubahan	1	Izin Usaha Perubahan	0
		Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan	0	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan	0
		Izin Usaha Poenggabungan Perusahaan	0	Izin Usaha Poenggabungan Perusahaan	0
<b>JUMLAH</b>		<b>83</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>44</b>	
2	LINGKUNGAN HIDUP	Izin Gangguan (HO)	649	Izin Gangguan (HO)	906
		Izin Pembuangan Air Limbah	12	Izin Pembuangan Air Limbah	19
		Izin Tempat Penyimpangan Sementara (TPS) Limbah B3	46	Izin Tempat Penyimpangan Sementara (TPS) Limbah B3	114
		Izin Pengumpulan Limbah B3	0	Izin Pengumpulan Limbah B3	0
		Izin Lingkungan	273	Izin Lingkungan	257

		Persetujuan Kelayakan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal)	17	Persetujuan Kelayakan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal)	15
<b>JUMLAH</b>			<b>821</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>1311</b>
<b>3</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen	5	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos	0
		Izin Instalatur Kabel Rumah Gedung (IKR/DG)	0	Izin Instalatur Kabel Rumah Gedung (IKR/DG)	0
		Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator	0	Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator	0
		Izin Galian untuk keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi	3	Izin Galian untuk keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi	0
		Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan Televisi	0	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan Televisi	0
		Rekomendasi Bangunan Menara Telekomunikasi	36	Rekomendasi Bangunan Menara Telekomunikasi	0
		Rekomendasi Warnet / wartel	3		
		Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi, Internet Service Provider (ISP)	10		
		Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/TV	1		
		Rekomendasi Usaha Telematika	0		
		Rekomendasi Usaha Media Cetak	0		
<b>JUMLAH</b>			<b>58</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>	Izin Lokasi	0		
<b>JUMLAH</b>			<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>PENDAPATAN</b>	Izin Reklame	0		
<b>JUMLAH</b>			<b>0</b>		
<b>6</b>	<b>PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI &amp; SUMBER DAYA MINERAL</b>	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3515	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3674
		Surat Izin Usaha Perdagangan - Minuman Beralkohol (SIUP - MB)	23	Surat Izin Usaha Perdagangan - Minuman Beralkohol (SIUP - MB)	55
		Tanda Daftar Gudang (TDG)	53	Tanda Daftar Gudang (TDG)	55
		Tanda Daftar Industri (TDI)	6	Tanda Daftar Industri (TDI)	0
		Izin Usaha Industri (IUI)	0	Izin Usaha Industri (IUI)	0
		Izin Perluasan	0	Izin Perluasan	0
		Izin Usaha Kawasan Industri	0	Izin Usaha Kawasan Industri	0
		Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3798	Izin Perluasan Kawasan Industri	0
		Izin Perluasan Kawasan Industri	0	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4818
<b>JUMLAH</b>			<b>5765</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>8602</b>
<b>7</b>	<b>PARIWISATA</b>	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	317	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	291
<b>JUMLAH</b>			<b>317</b>	<b>JUMLAH</b>	
<b>8</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor	7	Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor	7
		Izin Usaha Parkir Umum & Khusus	12	Izin Usaha Parkir Umum & Khusus	11
		Izin Usaha Angkutan Umum	8	Izin Usaha Angkutan Umum	0
<b>JUMLAH</b>			<b>27</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>9</b>	<b>TATA KOTA</b>	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	630	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	862

		Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	229	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	448
		Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)	1	Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>860</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>1310</b>
10	<b>TENAGA KERJA</b>	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1837	Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)	2611
				Izin lembaga pelatihan kerja	0
				Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	0
<b>JUMLAH</b>			<b>1837</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>2611</b>
11	<b>KESEHATAN</b>	Surat Izin Praktek Bidan	29	Surat Izin Praktek Bidan	0
		Izin Praktek Perawat	0	Izin Praktek Perawat	0
		Izin Kerja Perawat	0	Izin Kerja Perawat	0
		Izin Klinik Pratama/Utama	29	Izin Klinik Pratama/Utama	0
		Izin Rumah Bersalin	0	Izin Rumah Bersalin	0
		Izin Pendirian Rumah Sakit	0	Izin Pendirian Rumah Sakit	0
		Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan	0	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan	0
		Izin Operasional Rumah Sakit	0	Izin Operasional Rumah Sakit	0
<b>JUMLAH</b>			<b>58</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>
12	<b>KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN</b>	Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming	4	Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming	4
		Surat Izin Usaha Poultry Shop	1	Surat Izin Usaha Poultry Shop	0
<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>
13	<b>PASAR</b>	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	1	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	1
		Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	0	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	2
		Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	5	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	90
<b>JUMLAH</b>			<b>6</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL 113 JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN 2014(perwako 31/2012)</b>	<b>9837</b>	<b>TOTAL 57 JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN 2015 ( perwako 38/2015)</b>	<b>14.291</b>

### 2.3.4 Perkembangan Kegiatan Pengawasan dan Pengaduan

Tabel 3.2

KEGIATAN COFFEE MORNING DAN PELATIHAN PENYAMPAIAN LKPM YG TELAH DILAKUKAN BID.PENGAWASAN & PENGADUAN

BPMPTSP KOTA BATAM					
TAHUN 2015					
TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	ACARA/THEMA	PESERTA	
28 April 2015	COFFEE MORNING	Wisma Batamindo Lt.3 Kawasan Batamindo Investment Cakrawalla Muka Kuning Batam	Efektivitas dan Implementasi Penyampaian Laporan kegiatan Penanaman Modal Perusahaan dan Industri di Kota Batam	Seluruh Perusahaan/ tenant yang ada di Kawasan Batamindo Kota Batam	
12 Agustus 2015		Gedung Graha Citra Mas Kawasan Industri Kabil	Mendorong Iklim Investasi yang kondusif di Kota Batam	Seluruh Perusahaan/ tenant yang ada di Kawasan Kabil dan Kawasan Industri Taiwan Kota Batam	
21 OKTOBER 2015		Wisma Batamindo Lt.3 Kawasan Batamindo Investment Cakrawalla Muka Kuning Batam	Percepatan perizinan dan Gairah Investasi di Kota Batam	seluruh tenant yang ada di Kawasan panbil Industrial dan tunas industri kota Batam	
21 Mei 2015		Wisma Batamindo Lt.3 Kawasan Batamindo Investment Cakrawalla Muka Kuning Batam	Pelatihan tata cara penyampaian dan pengisian LKPM secara Online bagi perusahaan & Industri di Kota Batam	Seluruh Perusahaan/ tenant yang ada di Kawasan Batamindo Kota Batam	
03 September 2015	Pelatihan tata cara penyampaian dan pengisian LKPM secara Online bagi perusahaan & Industri di Kota Batam	Ruang Meeting Lt. 2 PT. Kabil Industrial Estate Citramas Niaga Commercial Centre Blk B2 no.3 & 3A kabil	Pelatihan tata cara penyampaian dan pengisian LKPM secara Online bagi perusahaan & Industri di Kota Batam	Seluruh Perusahaan/ tenant yang ada di Kawasan Kabil dan Kawasan Industri Taiwan Kota Batam	
27 Oktober 2015		Wisma Batamindo Lt.3 Kawasan Batamindo Investment Cakrawalla Muka Kuning Batam	Pelatihan tata cara penyampaian dan pengisian LKPM secara Online bagi perusahaan & Industri di Kota Batam	seluruh tenant yang ada di Kawasan panbil Industrial dan tunas industri kota Batam	

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENGADUAN LANGSUNG DAN ONLINE

### ***Persyaratan:***

Mengisi form yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

### ***Biaya Pelayanan:***

Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.

### ***Waktu Penyelesaian pelayanan***

#### 1. Pengaduan yang diterima oleh Badan Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( BPMPTSP ) Kota Batam melalui petugas penerima aduan Bidang Pengawasan dan Pengaduan melalui:

- Telepone : 0778-461814
- Email : pengaduan [bpmptsp@gmail.com](mailto:bpmptsp@gmail.com)
- Faximile : 0778-470335

#### 2. Pengaduan masyarakat, oleh SKPD yang berwenang tersebut

harus mendapatkan penanganan oleh pejabat yang berwenang;

#### 3. Dalam penanganan pengaduan masyarakat, oleh BPMPTSP harus dapat

mengidentifikasi dan mengklarifikasi serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan paling lama 3 sampai dengan 7 hari kerja ( bila tanpa koordinasi), dan 7 sampai dengan 30 hari kerja bila memerlukan koordinasi dengan Tim Teknis lainnya.

### ***Jenjang penyelesaian Pengaduan Masyarakat***

1. Menangani semua pengaduan dari masyarakat/investor terhadap pengurusan perizinan perusahaan yang akan atau telah beroperasi di Batam.
2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk pengaduan yang berada diluar kewenangan BPMPTSP, untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota Batam.c.q Sekretaris Kota Batam.

### ***Alur / Prosedur penyelesaian pelayanan pengaduan***

Setiap pengaduan masyarakat yang diterima Bidang Pengawasan dan Pengaduan BPMPTSP Kota Batam yang berkaitan dengan perizinan dikoordinasikan dengan SKPD / instansi terkait.

### **2.3.5. Perkembangan Kegiatan Penyebarluasan Data dan Informasi Investasi**

Fungsi-fungsi Bidang Data dan Informasi Investasi baru berjalan sejak perubahan SOTK BPM menjadi BPMPTSP Kota Batam sesuai Perda nomor : 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. Kemudian berubah menjadi Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam

Adapun Sasaran Kegiatan Datin adalah untuk Meningkatnya jumlah investasi di Kota Batam serta tersedianya data informasi investasi yang handal,

Tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) di Kota Batam sebagai pedoman kebijakan penanaman modal di Kota Batam.

Tabel 3.3

NO	KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	PENYEBARLUASAN DATA&INFORMASI INVESTASI	CAPAIAN PROGRAM 1 TH	TERSEDIANYA DATA INVESTASI DAN TERLAKSANANYA PENYEBARAN INFORMASI INVESTASI DI KOTA BATAM	TERSEDIANYA DATA INVESTASI DAN TERLAKSANANYA PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK
2.		WEBSITE BPMPTSP KOTA BATAM	TERSEDIANYA WEBSITE BPMPTSP KOTA BATAM	TERSEDIANYA WEBSITE BPMPTSP KOTA BATAM YG TERINTEGRASI DGN SPIPISE BKPM DAN APLIKASI DATA BPMPTSP
3.		PENYUSUNAN RUPM(RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL)KOTA BATAM	TERSEDIANYA DOKUMEN RUPM KOTA BATAM	TERSEDIANYA DOKUMEN RUPM KOTA BATAM SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL.DIKOTA BATAM.
4.		PEMBUATAN APLIKASI DATA INVESTASI	TERSEDIANYA APLIKASI DATA BPMPTSP KOTA BATAM	TERSEDIANYA DATA INVESTASI DAN TERLAKSANANYA PENYEBARAN INFORMASI INVESTASI KEPADA PUBLIK

		PENGADAAN SERVER	TERSEDINYA SERVER YANG AKAN MENUNJANG APLIKASI DATA YG AKAN DIBANGUN	TERSEDINYA SERVER YANG AKAN MENUNJANG APLIKASI DATA YANG TERINTEGRASI DGN SPIISE DAN WEBSITEBPMPTSP.
5.				

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### *Tantangan pengembangan Pelayanan OPD*

Dalam pengurusan izin masih terdengar keluhan dari para investor yang disebabkan pelayanan lambat, kurang transparan dan akuntabel. Selain itu masih ditemui kewenangan perizinan diproses diberbagai instansi daerah sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan. Pemerintah melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab sekaligus membuka peluang investasi didaerah.

Dalam pelaksanaan Undang- Undang No. 25 tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi investor dalam memulai usaha di Indonesia adalah dibidang pelayanan perizinan. Permasalahan tersebut merupakan tantangan pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dibidang penanaman modal sehingga pengurusan perizinan yang terpecah menjadi terpusat pada satu lembaga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terus berbedah dalam segala aspek untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang ada di PTSP.

Dalam Tahun Anggaran 2017 DPMPTSP Kota Batam telah menganggarkan pelayanan perizinan online untuk dua jenis perizinan SIUP dan TDP, namun untuk 50 ( lima puluh ) jenis perizinan lainnya akan dianggarkan sesuai dengan Pagu Anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Batam untuk tahun-tahun yang akan datang.

Tantangan Permasalahan Utama yang menghambat Investasi di Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 1.Politik Lokal yang tidak kondusif.
- 2.Proses perizinan investasi lama, berbelit dan tidak pasti
- 3.Manajemen lahan yang tidak jelas, lahan yang terlantar, penyerobotan lahan dan pembakaran hutan, lahan banyak dikuasai spekulan.
- 4.Proses perizinan dipelabuhan lambat dan kapasitas sarana bongkar muat pelabuhan terbatas serta sarat KKN.
- 5.Iklim ketenagakerjaan tidak kondusif, banyak demonstrasi, buruh menuntut upah untuk terus naik.
- 6.Hengkangnya beberapa investor besar.
- 7.Dukungan system IT yang tdk optimal.
- 8.Semakin marak rumah liar dan kios liar.
- 9.Kelangkaan Energi dan air.

Tantangan permasalahan diinternal DPMPTSP sendiri seperti:

- 1.Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, khususnya dalam penguasaan bahasa asing dan ahli IT.
- 2.Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan promosi Penanaman Modal dan Pengembangan IT.
- 3.Kurangnya kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait promosi Penanaman Modal.

### ***Peluang pengembangan penanaman modal di Kota Batam***

Batam memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. melalui peningkatan minat Negara-negara penanam modal, sehingga realisasi penanaman modal dapat tercapai.

Diinternal DPMPTSP sendiri perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Diklat Teknis, Kursus Bahasa, English day dan kegiatan lainnya.Selain itu

memaksimalkan fungsi media sosial dalam pemberian informasi dan penyampaian promosi Penanaman Modal seiring dengan peningkatan fungsi sarana dan prasarana yang ada. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi secara berkala dengan stakeholder terkait investasi.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD

Pada periode tahun 2011 sampai 2014 Keberadaan BKPM Pusat Jakarta dan BKPM Provinsi serta Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan DPMPTSP Kota Batam dipandang sebagai kekuatan dalam menciptakan kemajuan Investasi di Kota Batam.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batam menangani investasi Penanaman Modal Dalam Negeri( PMDN ), sedangkan Penanaman Modal Asing ditangani oleh Badan Pengusahaan Batam( Pusat), yang berkedudukan di Kota Batam dan berkantor di Gedung Sumatera Expo( Sumex).

Jadi dalam hal ini, penjabaran terhadap investasi Kota Batam yang dituangkan dalam Renstra ini hanya Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN)di Kota Batam.

Sepanjang lima tahun terakhir, Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang di peroleh dari Perkembangan Peizinan Penanaman Modal pada Jenis Perizinan *Izin Usaha* adalah sebagai berikut;

**Tabel 3.4**  
**REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**  
**KOTABATAM**

NO	URAIAN	TAHUN					TOTAL
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	INVESTASI	IDR112,987,930,364	IDR143,955,047,457	IDR251,326,266,221	IDR112,225,600,000	IDR130,062,100,000	IDR750,556,944,042
2	PERUSAHAAN	2	4	22	25	18	71
3	TENAGA KERJA	316	286	582	870	832	2,886



Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Investasi Penanaman Modal mengalami kenaikan sejak tahun 2011,2012 dan tahun 2013, namun terjadi penurunan pada tahun 2014, tetapi pada tahun 2015 kembali meningkat. Dan kemampuan serapan tenaga kerja pun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Letak strategis Kota Batam memberikan suatu potensi pengembangan investasi bagi investor. Peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam sangat diharapkan dalam mengakomodir seluruh permasalahan yang berkaitan dengan investasi Kota Batam.

Untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batam dalam rangka peningkatan Investasi Kota Batam, DPMPTSP mengadakan pembenahan dalam segala aspek, yang dituangkan pada Rencana strategi DPM-PTSP Pemerintah Kota Batam. Adapun pembenahan diarahkan pada Peningkatan semua Bidang yang terkait dengan Peningkatan Investasi.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil terpilih**

Sesuai dengan arahan RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 bahwa pemerintah kota Batam akan mewujudkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam Sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Visi Kota Batam :

***”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.***

Misi Kota Batam :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi,
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera,
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa,
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alih kapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah,
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik,

6. Mewujudkan percepatan pembangunan didaerah hinterland sebagai penopang dan penyanggaperekonomian Kota Batam.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 maka OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) akan melaksanakan Misi keempat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

Misi 4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

No	TUJUAN	SASARAN
1.	Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan serta peningkatan sektor perikanan dan pertanian	Terwujudnya optimalisasi Kota Batam sebagai tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan sasaran dalam Misi RPJMD tersebut, menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyusunan *tujuan* dan *sasaran* dalam Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2016-2021, agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2016-2021.

**TABEL 3.2**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**BERDASARKAN RPJMD KOTA BATAM PERIODE 2016-2021**

MISI (4)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
----------	--------	---------	-------------------	----------	----------------

Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ perikanan dalam menopang perekonomian daerah	Mengoptimalkan peran pemerintah kota batam dalam mendukung kegiatan pariwisata, industry dan perdagangan serta peningkatan sector perikanan dan pertanian.	Terwujudnya optimalisasi Kota Batam sebagai tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Persentase pertumbuhan investasi kota batam.	Meningkatkan peran PEMKO Batam dalam mempercepat pertumbuhan investasi	Mendorong percepatan pertumbuhan investasi.
---	--	---	--	--	---

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kepulauan Riau dengan Renstra DPM-PTSP agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kota Batam ke Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya secara nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Kota Batam dengan Provinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang DPM-PTSP baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Kota Batam sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target propinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2016-2021 sehingga diharapkan dapat meningkatkan Investasi Kota Batam. Dan selanjutnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

**TABEL3.3**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT**  
**DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN KOTA BATAM**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Capaian Sasaran Renstra Provinsi	Capaian Sasaran SKPD	Capaian Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Terciptanya pelayanan berbasis Perizinan berbasis teknologi.			Menurunya waktu pemrosesan investasi maksimal 15 hari/perizinan
		Menurunya waktu Pemrosesan Perizinan, Berkurangnya Persyaratan Perizinan			Menurunya waktu utk memulai usaha menjadi 7 hari. Menurunya jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 5 prosedur.

2	Meningkatnya Persentase Realisasi Investasi	Terlaksananya tupoksi Bidang Sekretariat guna kelancaran dalam pelaksanaan tupoksi Dinas keseluruhan.	Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN
		Terlaksananya tupoksi bidang promosi,data dan Informasi investasi.	
		Terlaksananya tupoksi bidang Pengawasan,Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	
		Terlaksananya tupoksi bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial	
		Terlaksananya tupoksi bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.	

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan analisa permasalahan dan perbandingan atas capaian kinerja sasaran Renstra DPM-PTSP dengan Renstra Propinsi dan Kementerian maka terdapat beberapa permasalahan yang mendasar yang harus dipecahkan agar pencapaian tujuan lima tahun kedepan dapat lebih baik.

Secara Nasional Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi peningkatan, jika diamati data dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan pertumbuhan rata-rata 28,3%, demikian juga dengan Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi peningkatan 20,8%.

Namun beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam peningkatan investasi Nasional periode 2015 -2019 adalah:

1. Sebaran Investasi yang tidak seimbang antara pulau jawa dengan luar jawa.
2. Investasi disektor manufaktur meningkat, tetapi sebagian besar untuk memenuhi pasar dalam negeri.
3. Proses Perizinan masih belum Efisien.
4. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal.
5. Ketersediaan Infrastruktur dan energy masih terbatas.
6. Proses pengadaan dan Perizinan lahan yang menjadi hambatan.

7. Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif.
8. Terhambatnya kepastian usaha bagi investor.
9. Kondisi bisnis Indonesia belum bisa bersaing dengan Negara lain.
10. Pasar tenaga kerja kurang kondusif.
11. Masih tingginya perilaku anti persaingan yang menghambat insentif untuk berinvestasi, dan menghambat tumbuhnya industry manufaktur dan usaha baru.

Di Provinsi Kepulauan Riau (BKPM) Sasaran Pembangunan tahun 2014 adalah Meningkatkan serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN. Untuk mencapai sasaran telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) rasio daya serap tenagakerja PMA ditargetkan sebesar 12.000 orang, dan (2) rasio daya serap tenaga kerja PMDN ditargetkan sebesar 1.400 orang, evaluasi kinerjanya sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	PMA	12.000	11.122	92.68
2	PMDN	1.400	1.295	92.5

Penanaman modal asing (PMA) diartikan bahwa kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, kemudian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

**Tabel 3.5**  
**Persebaran serapan tenaga kerja asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) perkabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014**

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah		PMA + PMDN
		Tenaga Kerja Asing (PMA)	Tenaga Kerja Dalam Negeri (PMDN)	
1	Tanjung Pinang	2.320	59	2.379

2	Batam	3.957	656	4.613
3	Bintan	3.746	253	3.999
4	Karimun	516	154	670
5	Lingga	219	82	301
6	Natuna	221	42	263
7	Anambas	143	49	192
	Provinsi Kepri	11.122	1.295	12.417

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan PMA dan PMDN, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja daya serap tenaga kerja PMA terserap sebesar 92,68% dari target 12.000 tenaga kerja, optimalnya serapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing ini menjadikan indikator kinerja masuk dalam kategori sangat baik dan serapan tenaga kerja pada perusahaan PMDN capaian kinerjanya adalah 92,5% dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 1.400 tenaga kerja, sehingga capaian kinerja tersebut juga dikategorikan sangat baik. Untuk melihat persebaran serapan tenaga kerja PMA maupun PMDN per kabupaten/kota di Provinsi Kepri dapat dilihat pada tabel 3.5.

Perkembangan serapan tenaga kerja di Kepri baik penanaman modal asing maupun dalam negeri setiap tahun cenderung meningkat, hal ini dipengaruhi bahwa Kepri merupakan daerah industry khususnya Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Bintan. Berikut perkembangan capaian dan target per kabupaten/kota tahun 2011 sampai dengan 2014 di Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Target dan capaian kinerja sasaran meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN Tahun 2011 s.d 2014**

No	Tahun	Indikator Sasaran	Target	Capaian	% Capaian
1	2011	PMA	6.000	7.389	123,15
		PMDN	1.100	1.123	102,09
2	2012	PMA	8.220	7.342	89,32

		PMDN	1.500	2.122	141,47
3	2013	PMA	10.000	15.737	157,37
		PMDN	1.300	5.369	413,00
4	2014	PMA	12.000	11.122	92,68
		PMDN	1.400	1.295	92,50

Di Kota Batam Pertumbuhan Investasi pada periode 2011 sampai 2015 dari tahun ketahunnya berfluktuasi baik PMDN maupun PMA. PMDN rata-rata pertumbuhannya 16% pertahun. Jika mengamati fluktuasi sebagaimana diatas faktor Ekternal masih banyak berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Investasi di Kota Batam, seperti Kondisi Ekonomi secara Global dan fluktuasi inflasi.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi OPD**

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam periode 2016 - 2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mendapat cantolan misi ke empat pada misi Walikota terpilih dan dalam RPJMD 2016-2021, yaitu mewujudkan penguatan sektor jasa, perdagangan, pariwisata dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah, adapun Visi dan Misi OPD tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Visi**

“Terwujudnya peningkatan investasi dan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien guna mendukung percepatan pembangunan dan ekonomi Kota Batam.”

#### **Misi**

1. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Meningkatkan promosi yang profesional dalam dan luar negeri
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal
4. Meningkatkan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang profesional
5. Mengelola sistem data, potensi investasi dan informasi penanaman modal yang akuntabel
6. Menyediakan sistem perencanaan dan evaluasi penanaman modal yang efektif dan efisien
7. Meningkatkan kualitas SDM, sarana / prasarana pendukung peningkatan investasi dan pelayanan perizinan.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis di DPM-PTSP maka untuk mewujudkan visi dan misi DPM-PTSP periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran.

Adapun *tujuan Jangka Menengah* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan sumberdaya, Pelayanan dan sarana/ prasarana aparatur.
2. Melaksanakan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun stakeholder.
3. Menyediakan system pendataan dan informasi Investasi berbasis teknologi.
4. Melaksanakan pelayanan perizinan investasi yang efektif, efisien dan transparan.
5. Melaksanakan promosi, menjalin kerjasama dalam dan luar negeri.
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian investasi.

*Sasaran Jangka Menengah* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan sumberdaya, Pelayanan dan sarana/ prasarana aparatur.
2. Terlaksananya perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun stakeholder.
3. Tersedianya system pendataan dan informasi Investasi berbasis teknologi.
4. Terlaksananya pelayanan perizinan investasi yang efektif, efisien dan transparan.
5. Terlaksananya promosi, menjalin kerjasama dalam dan luar negeri.
6. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian investasi.

Penjelasan dengan Tabel sebagai berikut:

**TABEL 4.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
DPM-PTSP KOTA BATAM**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2016)	TARGET KINERJA SASARAN					TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
Optimalisasi Kota Batam sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, perikanan dan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan investasi di Kota Batam	Persentase pertumbuhan investasi Kota Batam.	persen	15,89 %	19 %	20 %	21,50 %	22,20%	22,50%	
Mewujudkan ketertiban pelaksanaan investasi dan perizinan.  Menciptakan pelayanan perizinan yang	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan .pengendalian investasi.	Tersedianya dokumen perencanaan hasil kajian penanaman modal yang								



transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan investasi.	Meningkatnya system pelayanan perizinan investasi yang efektif, efisien dan transparan.	dapat digunakan oleh investor, instansi dan unit kerja lain (1 dokumen RUPM ,RENSTRA DPM PTSP 2016-2021 dan 4 sektor potensi investasi).  Meningkatnya Realisasi Investasi melalui <b>LKPM</b> dan melalui jumlah pelayanan perizinan penanaman modal jenis perizinan <b>Izin Usaha</b> .  Jumlah Perusahaan yang diawasi sesuai dengan ketentuan perizinan								
Menyediakan data dan informasi investasi yang akurat	Terwujudnya system informasi investasi yang akuntabel.	Jumlah laporan perkembangan data dan informasi Investasi untuk mengukur perkembangan investasi.								

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis sesuai peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dilakukan analisa SWOT (*strength, Weakness, Opportunities dan Threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat tercapai. Adapun Analisa SWOT adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.2**  
**ANALISA SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG(OPPORTUNNITY)	ANCAMAN(THREATS )
FAKTOR INTERNAL	PTSP KOTA BATAM 2016 - 2021	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komitmen Pemerintah Pusat menjadikan Kota Batam sebagai daerah maritime.</li> <li>b. Komitmen Pemerintah Pusat memberikan kemudahan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berada pada daerah perbatasan dengan luar negeri.</li> <li>b. Demonstrasi buruh terhadap UMR..</li> <li>c. Laju Inflasi Nasional.</li> </ul>	
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>(SO)</b>	<b>(ST)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Letak Strategi Kota Batam.</li> <li>b. Batam sebagai Kota Industri.</li> <li>c. Batam Memiliki dua system pemerintahan dalam pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Letak strategis Kota Batam yang mendorong terbukanya potensi investasi yang secara struktural kewenangannya berada pada DPM-PTSP Kota Batam sebagai Kota Industri.</li> <li>b. Dengan adanya Jumlah Pegawai yang Memadai serta didukung oleh instansi terkait menjadikan DPM-PTSP penting keberadaannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur organisasi dengan Pegawai yang memadai diupayakan dapat mengerjakan pekerjaan walaupun SDM terbatas.</li> <li>b. Dengan sarana dan prasarana yang ada diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan.</li> </ul>	
<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>	<b>(WO)</b>	<b>(WT)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimnya Jumlah dan kemampuan pegawai memahami IPTEK.</li> <li>b. Kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.</li> <li>c. Belum updatenya database Investasi</li> <li>d. Masih kurangnya motivasi pegawai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Bimbingan Teknis Pegawai berkaitan dengan IPTEK.</li> <li>b. Pengadaan Sarana dan Prasarana</li> <li>c. Pengadaan system data dan informasi investasi yang berbasis teknologi</li> <li>d. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur melalui dukungan Pelayanan Keuangan, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Sistem Perencanaan, Evaluasi Pengendalian dan Penyediaan Data Informasi yang akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kerawanan perbatasan dapat diatasi dengan penyatuan kekuatan pimpinan di Kota Batam.</li> <li>b. Keterbatasan SDM dapat dilakukan dengan Efektivitas SDM yang ada demikian juga dengan keterbatasan IPTEK.</li> <li>c. Keterbatasan Anggaran dapat dilakukan dengan kerja yang efisien dan efektif.</li> </ul>	
<b>No.</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
1	Mengikuti event-event promosi strategis di dalam dan luar negeri.	Mengupayakan pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan arus investasi	Peningkatan promosi daerah
2	Melakukan fungsi-fungsi pengawasan, pengaduan dan pengendalian investasi secara efektif	Mengupayakan melakukan fungsi – fungsi pengawasan, pengaduan dan pengendalian investasi secara efektif untuk mendorong penguatan investasi.	Peningkatan pelayanan, pengawasan dan pengendalian investasi
3	Menyediakan data dan desiminasi informasi investasi Menyediakan data dan desiminasi informasi investasi	Mengupayakan pengembangan sistem aplikasi pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi dengan stakeholder terkait.	

4	Menyediakan pelayanan perizinan berbasis teknologi.	Mengupayakan pelayanan perizinan yang maksimal kepada Investor Dalam Negeri maupun Investor Luar Negeri melalui sistem perizinan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan perizinan online	
5	Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	Mengupayakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perizinan investasi		

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun (2016 – 2021) adalah sebagaimana table terlampir:

Penjelasan table Rencana Program Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, sebagai berikut:

- Capaian pertumbuhan investasi di Kota Batam periode 2011-2015 sebesar 18,14 % dan Proyeksi Pertumbuhan investasi nasional sebesar 19.55 %.
- Data ini yang menjadikan DPMPTSP optimis untuk menetapkan rencana realisasi pertumbuhan investasi Kota Batam sebagaimana point 2.
- Adapun asumsi2 lain yang menjadi optimisme DPMPTSP adalah sbb :
  1. Kemudahan pelayanan perizinan melalui PTSP.
  2. Penetapan Kota Batam sebagai kawasan FTZ / KEK.
  3. Peningkatan infrastruktur di Kota Batam.
  4. Asumsi pertumbuhan Investasi secara Nasional cenderung meningkat.
  5. Regulasi pro Investasi.
  6. Penurunan suku bunga perbankan.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun (2016 – 2021),maka Indikator Kinerjanya yang akan dicapai adalah sebagaimana **table terlampir**.

Batam, 30 Januari 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

**H.GUSTIAN RIAU, SE,MSi**  
**NIP. 19690830 199212 1 001**